

## ABSTRAK

Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki wewenang secara formal untuk menetapkan kebijakan sebagai upaya menanggulangi sengketa tanah dan pemercepatan dalam pemenuhan hak-hak atas kepemilikan tanah di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan meluncurkan program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis: (1) pengaturan terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), (2) dinamika masyarakat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Blora, (3) hambatan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian menggunakan teori kepastian hukum, teori sistem hukum, dan teori bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Berdasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Tahapan-tahapan tersebut yaitu Persiapan, Penyuluhan, Pengukuran dan pemetaan bidang, Pengumpulan Data Yuridis, Pengolahan Data Yuridis dan Pembuktian Hak, Pemeriksaan Tanah, Pengumuman, Pengesahan, Penerbitan SK Penetapan Hak dan SK Penegasan/Pengakuan Hak, Pembukuan Hak. (2) Dalam hal ini dinamika masyarakat terhadap penerapan program PTSL dengan melihat kemanfaatan pada program tersebut yang memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat, masyarakat penerima sertifikat tanah melalui PTSL dapat digerakkan secara bersama-sama untuk melakukan berbagai usaha produktif yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Sertifikat tanah hasil program PTSL sama dengan hasil pendaftaran tanah secara sporadis yaitu sertifikat Hak Milik. Sertifikat Hak Milik dapat dibebani Hak Tanggungan sebagai syarat perolehan kredit modal. (3) Hambatan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dalam melaksanakan program PTSL yaitu rendahnya minat keikutsertaan masyarakat dan hambatan dan permasalahan terkait dengan bidang yuridis, dan bidang fisik.

**Kata Kunci: Dinamika Masyarakat, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kantor Pertanahan**

## **ABSTRACT**

The government as the organizer of the state has formal authority to set policies in an effort to overcome land disputes and accelerate the fulfillment of rights to land ownership in Indonesia. One of the efforts made is through government policy through the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency by launching a National Priority program in the form of the Acceleration of Systematic Complete Land Registration (PTSL).

This study aims to determine, study and analyze: (1) arrangements related to the Complete Systematic Land Registration program (PTSL), (2) community dynamics in implementing a complete systematic land registration in Blora Regency, (3) obstacles faced by the Blora District Land Office in implementation of complete systematic land registration. The approach method used in this research is sociological juridical. The specifications of this study are analytical descriptive. Data sources used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. Then secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Research uses the theory of legal certainty, legal system theory, and the theory of the operation of law in society.

Based on the results of the study it can be concluded: (1) Based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning Number 6 Year 2018 concerning the Acceleration of the Implementation of Systematic Complete Land Registration. These stages are Preparation, Counseling, Measurement and mapping of fields, Collection of Juridical Data, Processing of Juridical Data and Proof of Rights, Land Inspection, Announcement, Ratification, Issuance of Certificate of Establishment of Rights and Certificate of Affirmation or Recognition of Rights, Bookkeeping Rights. (2) In this case the dynamics of the community towards the application of the PTSL program by looking at the benefits of the program which have a major influence on the welfare of the community. In an effort to realize community welfare, the community receiving land certificates through PTSL can be mobilized together to carry out various productive businesses that are expected to improve the community's economy. The land certificate from the PTSL program is the same as the result of sporadic land registration, which is the certificate of ownership. Certificate of Ownership can be encumbered as a condition for obtaining capital loans. (3) Barriers faced by the Blora District Land Office in implementing the PTSL program are the low interest in community participation and obstacles and problems related to the juridical and physical fields.

**Keywords: Community Dynamics, Complete Systematic Land Registration, Land Office**